



PROGRAM PEMERINTAH

Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan dimulai pada awal pekan depan. Pelaku usaha lokal dilibatkan untuk menyuplai bahan makanan agar program ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

Kepastian pelaksanaan program makan bergizi gratis ditegaskan oleh sejumlah menteri setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat (3/1/2025), di Istana Bogor, Jawa Barat.

Rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam itu diikuti, antara lain, oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

"Pelaksanaannya (makan

bergizi gratis) 6 Januari," ujar Budi Arie sesuai rapat terbatas.

Budi Arie melanjutkan, bahan-bahan makanan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis berasal dari komoditas lokal. Berbagai pelaku usaha, termasuk badan usaha milik desa (BUMDes), akan dilibatkan untuk mendukung program itu. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga petani, peternak, dan pedagang lokal.

Didukung koperasi

Menurut Budi Arie, ada 1.923 koperasi yang siap berkontribusi menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo itu. Koperasi yang bergerak di bidang usaha seperti telur, sayur, beras, ikan, dan susu akan menyuplai produknya untuk makan bergizi gratis.

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Makan Bergizi Gratis

(Sambungan dari halaman 1)

Bahkan, untuk kebutuhan susu, koperasi susu se-Jawa Timur diperkirakan mampu memenuhinya untuk program makan bergizi gratis di provinsi itu. Sementara untuk daerah lain yang suplainya masih kurang, pihaknya akan berupaya meningkatkan produksi susu agar mampu memenuhi kebutuhan.

"Arahan Presiden Prabowo bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, bukan impor sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat," ucap Budi Arie.

Gunakan dana desa

Yandri menambahkan, sebanyak 20 persen dari total anggaran dana desa di 2025 sebesar Rp 71 triliun akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. BUMDes juga akan turut dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis. Mereka bisa berkontribusi menyalurkan sejumlah hasil bumi, seperti jagung, ikan, dan buah sesuai dengan keunggulan tiap-tiap desa.

"Arahan Bapak Presiden, program makan siang bergizi dilakukan bersama-sama dengan koperasi dan BUMDes. Maka, sepatutnya bahan bakunya juga dari desa," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyebut implementasi program makan bergizi gratis di 2025 dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hingga 0,86 persen. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Jakarta, akhir Desember lalu.

"Pemerintah akan menggelontorkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program ini (di 2025) yang akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan lapangan kerja, sarana dan prasarana logistik, serta menumbuhkan

desa swasembada pangan, energi dan air," ujarnya kala itu.

Rachmat juga menyampaikan, tingkat permintaan untuk menjalankan program ini pada 2025 akan menciptakan gelombang pasokan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Perhitungan Bappenas, efek ekonomi dari program makan bergizi gratis pada tahun pertama berjalannya RPJMN 2025-2029 bisa menopang tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,86 persen.

Sementara penerima manfaat dari program ini, antara lain, ibu hamil, anak balita, dan anak sekolah hingga SMA. Pada tahun pertama pelaksanaan, diharapkan pemerintah mampu menyelesaikan 40 persen dari target 82 juta penerima manfaat program ini.

Pemilihan lokasi untuk tahun pertama didasarkan pada kesiapan setiap titik atau daerah. Untuk daerah atau kawasan yang infrastrukturnya belum memadai atau harus disiapkan, akan diterapkan skema lain agar program ini tetap berjalan. "Diharapkan, dari tahun ke tahun program yang termasuk dalam PSN (proyek strategis nasional) ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah secara berkelanjutan," katanya.

Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional itu, Presiden Prabowo mengatakan, program makan bergizi ini bisa menambah jumlah uang yang beredar di desa hingga Rp 7 miliar per desa atau tujuh kali lipat dari dana desa saat ini yang dianggarkan Rp 1 miliar per desa.

Presiden memperingatkan kepada seluruh pemangku kebijakan program ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tidak menjadikan program ini sebagai ladang korupsi.

"Saya ingatkan untuk seluruh aparat, budaya *mark up*, penggelembungan barang/proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek Rp 100 juta, ya, (laporkan) Rp 150 juta, jangan bilang jadi Rp 150 juta," ucap Prabowo. (SYA)



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
